



# RENCANA KERJA

# 2023

*BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDUNG*





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Hidayah-Nya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung, dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja Bakesbangpol) Kota Bandung Tahun 2023 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Dokumen Renja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 guna memberikan gambaran rencana pembangunan di Kota Bandung lingkup urusan pemerintahan umum, bidang kesatuan bangsa dan politik untuk tahun 2023, setelah *mereview* kembali capaian kinerja tahun sebelumnya, dan akan dijadikan panduan dan pedoman dalam rencana pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Kota Bandung pada tahun 2023.

Renja Bakesbangpol Tahun 2023 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2023 dan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2018-2023 c.q. Perubahan Renstra Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Akhirnya kami berharap agar Renja Bakesbangpol Kota Bandung 2023 ini lebih baik dan dapat menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang berkelanjutan, menuju Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis

Demikian untuk menjadi bahan selanjutnya, dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDUNG,**

Issued by

**Drs. H. BAMBANG SUKARDI, M. Si.**

Pembina Utama Muda/ IV c

NIP. 19671005 198903 1 008

**Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik**



## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR.....i**

**DAFTAR ISI ..... ii**

**DAFTAR GAMBAR..... ii**

**DAFTAR TABEL..... iii**

**BAB I PENDAHULUAN .....1**

1.1 Latar Belakang ..... I-1

1.2 Landasan Hukum..... I-5

1.3 Maksud dan Tujuan ..... I-9

1.4 Sistematika Penulisan ..... I-10

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 ...II-1**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ..... II-1

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan ..... II-11

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah . II-12

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD ..... II-12

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....III-1**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... III-1

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah ..... III-2

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN ..... III-3

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK..... IV-1**

**BAB V PENUTUP ..... V-1**

5.1 Catatan Penting..... V-1

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan..... V-1

5.3 Rencana Tindak Lanjut ..... V-2

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota..... I-2

Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran ..... I-4

Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen ..... I-4





DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Bandung .....I-2

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung ..... II-11

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kota Bandung ..... II-14

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung..... III-3

Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kota Bandung..... III-4

Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023 Kota Bandung ..... IV-1



Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*) yaitu pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung menyusun Dokumen Renja 2023 yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya Renja ini, diharapkan pelayanan Bakesbangpol Kota Bandung dapat berperan secara optimal.

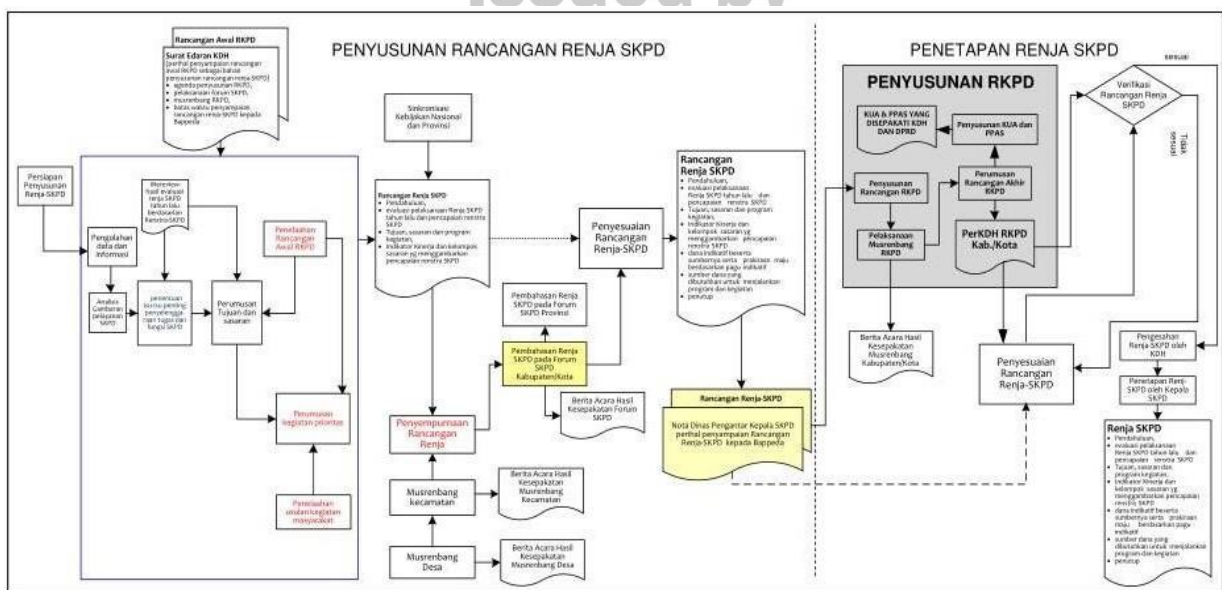
### 1.1.1. Pengertian Renja

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Renja SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Bakesbangpol Kota Bandung merupakan SKPD di Kota Bandung yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja SKPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman di lingkungan SKPD dalam

### 1.1.2 Proses Penyusunan Renja

1. Substansi Renja SKPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja SKPD yang mengacu Perkada RKPD;
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan;
3. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan / sub kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan;
4. Renja SKPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan SKPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA SKPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



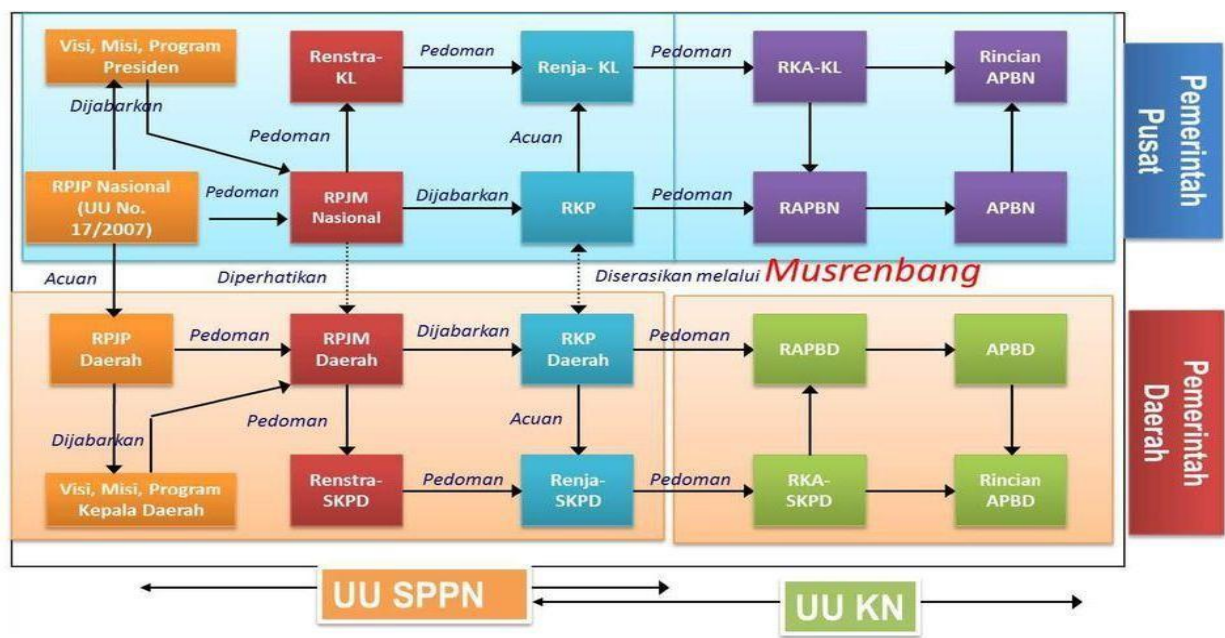
Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja SKPD Kabupaten/Kota

Adapun tahapan persiapan penyusunan renja Perangkat Daerah tertuang dalam Pasal 125 s.d. Pasal 143 Permendagri No.86 Tahun 2017 dengan tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepda tentang pembentukan tim penyusun Renja; orientasi mengenai Renja; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah; berpedoman pada Renstra, berdasarkan evaluasi hasil Renja tahun lalu, dan evaluasi hasil Renja tahun berjalan. Hasil perumusan rancangan awal Renja, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
  - pendahuluan;
  - hasil evaluasi Renja tahun lalu;
  - tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
  - rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - penutup.
- c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah; merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja. Kemudian disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan, bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja. Hasil pembahasan kemudian dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
- f. Penetapan Renja Perangkat Daerah; Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.



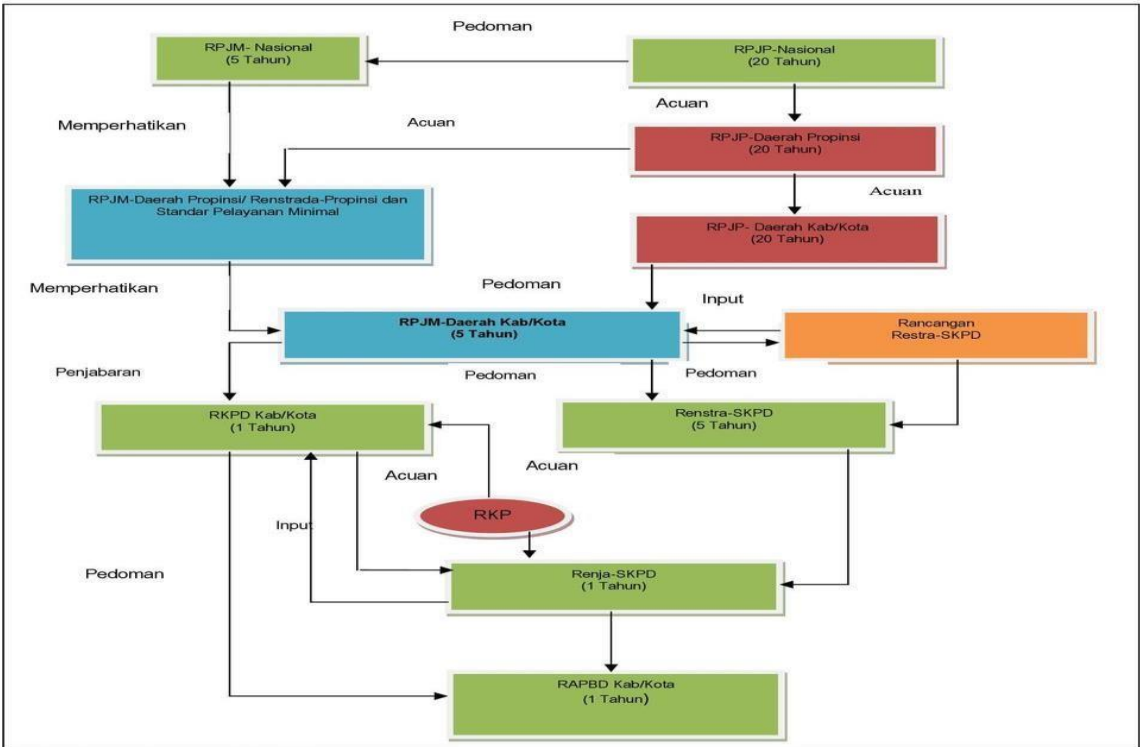
Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

### 1.1.3 Keterkaitan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Renja sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan proses yang sistematis dan terpadu, maka tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3 Bagan Hubungan Antar Dokumen



## 1.2 LANDASAN HUKUM

Beberapa aturan dan pedoman yang dijadikan acuan dalam rangka perencanaan dan penganggaran serta penyusunan Renja antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan yang terdapat pada, dapat dirinci sebagai berikut:

### 1.2.1 Aturan umum terkait Penyusunan RENJA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, tentang Hibah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No 06 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda No. 03 tahun 2019 tentang Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

**1.2.2 Aturan yang terkait dengan Tugas Pokok Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor :17 Tahun 2013;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Politic Right (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
4. Undang-Undang Pemilu UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

7. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011, tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing;
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Undang-Undang 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor :83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
12. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967, tentang Penetapan Tanggal 1 Oktober sebagai Peringatan Hari Kesaktian Pancasila;
13. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006, tentang Hari Bela Negara;
14. Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967, tentang Penetapan Tanggal 1 Oktober sebagai Peringatan Hari Kesaktian Pancasila;
15. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
16. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019;
18. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Kraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010, tentang Pemantauan Tenaga Kerja Asing;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011, tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.11 Tahun 2006, tentang Komunitas Intelegen Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011, tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014, tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
35. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009; Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
36. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Mendagri Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : KEP-033/A/JA/6/2008 dan Nomor : 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 – 440 Tahun 2019 Tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang



Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;

38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
39. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
40. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
41. Peraturan Walikota Bandung Nomor 23 TAHUN 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Tujuan**

Tujuan penyusunan Renja Bakesbangpol adalah untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan Bakesbangpol selama periode satu tahun yaitu tahun 2023 sehingga secara konsekuen dan konsisten dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Bakesbangpol Kota Bandung yang mengacu pada RKPD Kota Bandung Tahun 2023 dan berpedoman pada Perubahan Renstra Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2013-2018.

#### **1.3.2 Maksud**

Maksud penyusunan Renja Bakesbangpol Kota Bandung antara lain:

1. Merumuskan dan menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun kedepan sesuai tugas dan fungsi Bakesbangpol yaitu tahun 2023;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan tahun 2023;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan selama satu tahun kedepan yaitu tahun 2023;

4. Sebagai bahan dan tolok ukur dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota tahun 2023 terutama dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol.

#### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dokumen Renja Bakesbangpol Kota Bandung 2023 disusun, sebagai berikut :

##### BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renja, fungsi Renja dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan Renja.

##### BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Kota Bandung tahun lalu (tahun n-2) yaitu tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yaitu tahun 2022, mengacu pada APBD tahun berjalan yaitu tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2018-2023, berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bakesbangpol tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu yaitu tahun 2021, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

##### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bakesbangpol Kota Bandung.

##### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2023.

##### BAB V PENUTUP

Bab ini memuat Catatan Penting, Kaidah Pelaksanaan, dan Rencana Tindak Lanjut.

## **BAB II**

# **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**

### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Bakesbangpol pada Perubahan Renstra Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2018-2023 melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Evaluasi ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bakesbangpol Kota Bandung tahun lalu (n-2) yaitu tahun 2021 dan perkiraan tahun berjalan (n-1) yaitu tahun 2022, mengacu pada APBD Tahun sedang berjalan, tahun 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bakesbangpol berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Bakesbangpol tahun-tahun sebelumnya.

Adapun evaluasi pelaksanaan kinerja Bakesbangpol dapat dilihat pada Tabel 2.1. tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bakesbangpol dan Pencapaian Renstra Bakesbangpol sampai dengan Tahun 2022 (Tahun Berjalan /n-1). Evaluasi ini diperlukan guna melihat efektivitas program/kegiatan/sub kegiatan, kebutuhan anggaran yang telah dipergunakan dan melihat beberapa realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang sudah memenuhi target, belum memenuhi, atau bahkan melewati target, faktor-faktor penyebab atau yang mempengaruhi terlaksananya suatu program/kegiatan/sub kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target kinerja dan akhirnya kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi beberapa faktor penyebab tersebut.

Bakesbangpol untuk Renja tahun 2023 melakukan simplikasi program/kegiatan/sub kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 c.q. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021. Untuk rincinya bisa dilihat di tabel berikut :

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kota Bandung

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan asn		12 Bulan	12 Bulan	100%	100%		
8	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		12 Bulan	12 Bulan	100%	100%		
8	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	300%
8	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	200%	
8	01	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terfasilitasinya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	60 Stel	60 Stel	55 Stel	100%	50 Stel	165 Stel	275%
8	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100%	100%	100%	100%	200%	
8	01	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan penyediaan	100%	100%	100%	56%	100%	256%	256%





COPY OF ORIGINAL

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						peralatan dan perlengkapan kantor								
8	01	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan penyediaan perlatan rumah tangga	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	12 Laporan	28 Laporan	233%
8	01	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan penyediaan makanan dan minuman	12 Laporan	12 Laporan	100%	77%	77%	12 Bulan		
8	01	01	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Laporan	12 Laporan	100%	92%	92%	12 Bulan		
8	01	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Jasa bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang tersedia dan Jumlah jasa layanan masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	11 Jasa, 1 Jasa	11 Jasa, 1 Jasa	100%	12 Bulan	36	300%
8	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sesuai prosedur	12 Laporan	12 Laporan	100%	34%	34%	12 Bulan		

Bangsa dan Politik



COPY OF ORIGINAL

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	cakupan penyediaan barang milik daerah			1 Laporan	1 Laporan	100%	100%		
8	01	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas						100%		
8	01	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah laporan pengadaan mebeler	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Tahun	3 Tahun	300%
8	01	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan pengadaan peralatan dan mesin lainnya			2 Laporan	1 Laporan	100%	1 Tahun	3 Tahun	
8	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%		200%	
8	01	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum dan kantor			7 Jasa/Bulan	7 Jasa/Bulan	100%	7 Orang / Bulan	14 /bulan	
8	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	1 Jasa/bulan	1 Jasa/bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	300%
8	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	cakupan pemeliharaan barang milik			100%	75%	75%	100%	175%	

Bangsa dan Politik



COPY OF ORIGINAL

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						daerah penunjang urusan pemerintah daerah								
8	01	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase unit kendaraan dinas/Operasional yang terpelihara	12 Jasa Bulanan	12 Jasa Bulanan	100%	kendaraan roda empat 12 unit, kendaraan roda dua 34 unit	100%	1 Tahun	36 Bulan	300%
8	01	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa pemeliharaan perlatan dan mesin lainnya			3 Jasa/Tahun	3 Jasa/Tahun	100%	1 Tahun	15 Bulan	
8	01	01	209	10	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Laporan	1 Laporan	1 Gedung	1 Gedung	100%	1 Tahun	3 Gdung	300%
8	01	02			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup ideologi			100%	100%	100%	100%	200%	
8	01	02	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	terlaksananya jambore kebangsaan, kemah Pancasila, dan pendidikan bela negara			8 kegiatan	8 kegiatan	100%	1 Aktifitas,7 Aktifitas, 20 Aktifitas, 1 Aktifitas, 3 Aktifitas		

Bangsa dan Politik



COPY OF ORIGINAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	01	02	201	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	terfasilitasinya hibah; terlaksananya jambore kebangsaan; terlaksananya kemah pancasila; terlaksananya upacara hari hari besar; terlaksananya pendidikan bela negara		1 Forum, 1 Kegiatan, 2 Kegiatan, 3 Kegiatan, 1 Kegiatan	1 Forum, 1 Kegiatan, 1 Kegiatan, 3 Upacara, 1 Kegiatan,	88%	1 Aktifitas,20 Aktifitas,1 Upacara,3 Upacara		
8	01	02	201	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	terlaksananya koordinasi		7 Koordinasi	7 Koordinasi	100%	7 Aktifitas		
8	01	03			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	persentase potensi konflik tidak menjadi konflik		100%	100%	100%	100%	200%	

Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik





COPY OF ORIGINAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	01	03	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan	Terlaksananya bimtek, diskusi dan kemah parpol		13 keg	13 keg	100%	2 Aktifitas, 1 Aktifitas, 1 Aktifitas, 5 Aktifitas, 4 Aktifitas, 20 Aktifitas		
8	01	03	201	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan	terfasilitasinya hibah parpol; terlaksananya bintek parpol; terlaksananya pembinaan politik masyarakat.		10 Parpol, 2 Kegiatan, 3 Kegiatan	9 Parpol, 1 Kegiatan, 1 Kegiatan	73%	4 Aktifitas, 5 Aktifitas		
8	01	03	201	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan			0 Kordinasi			24 Aktifitas		
8	01	04			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase potensi konflik tidak menjadi		100%	100%	100%	100%	200%	

Bangsa dan Politik



COPY OF ORIGINAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					konflik lingkup Sosial Kemasyarakatan								
8	01	04	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya jambore, sosialisasi dan verifikasi ormas		25 Kegiatan	25 Kegiatan	100%	50 Ormas, 11 Aktifitas, 1 Aktifitas		
8	01	04	201	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing Daerah	Pemberdayaan ormas, terfasilitasinya hibah ormas; terlaksananya sosialisasi undang-undang ormas; terlaksananya verifikasi ormas		1 kegiatan, 4 Ormas, 1 Kegiatan, 8 Kegiatan	1 kegiatan, 4 Ormas, 1 Kegiatan, 8 Kegiatan	100%	1 Aktifitas, 11 Bulan, 50 Ormas		
8	01	05			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	persentase konflik tidak menjadi konflik lingkup ekonomi sosial dan budaya		100%	100%	100%	100%		
8	01	05	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	terlaksananya sosialisasi perda dan bahaya narkoba serta koordinasi		6 kegiatan	6 Kegiatan	100%	1 Aktifitas, 10 Aktifitas, 10 Aktifitas, 1 Aktifitas		

Bangsa dan Politik



COPY OF ORIGINAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					ketahanan ekonomi								
8	01	05	201	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	terfasilitasinya FKUB; konsolidasi P4GN,terfasilitasinya hibah instansi vertical		1 kegiatan; 2 kegiatan; 1 instansi	1 kegiatan; 2 kegiatan; 1 instansi	100%	1 Aktifitas, 1 Aktifitas, 10 Aktifitas, 10 Aktifitas		
8	01	06			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup kewaspadaan nasional		100%	95%	95%	100%		
8	01	06	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Terfasilitasinya rakor forum, TKDD, dan FGD orang asing		8 kegiatan	8 Kegiatan	100%	12 Bulan, 26 Aktifitas, 9 Bulan, 20 Aktifitas, 2 Rakor, 12 Bulan		
8	01	06	201	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing Kewaspadaan, Serta	terfasilitasinya hibah forum; terfasilitasinya hibah instansi vertikal; terlaksananya FGD pengawasan		1 Forum, 2 Instansi, 1 Kegiatan, 1 Kegiatan, 1 Kegiatan, 1 Kegiatan	1 Forum, 2 Instansi, 1 Kegiatan, 1 Kegiatan, 1 Kegiatan, 1 Kegiatan	100%	20 Aktifitas, 26, Aktifitas, 12 Bulan, 12 Bulan		

Bangsa dan Politik



COPY OF ORIGINAL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Pencapaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
					Penanganan Konflik di Daerah	orang asing; terlaksananya forum kewaspadaan dini masyarakat; terlaksananya konsolidasi pengawasan orang asing; terlaksananya konsolidasi tim kewaspadaan dini daerah							
8	01	06	201	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	terlaksananya koordinasi kewaspadaan dini		2 koordinasi	2 Koordinasi	100%	9 Bulan		
8	01	06	201	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	terfasilitasinya konsolidasi forum koordinasi pimpinan daerah		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	2 Rakor	3 Kegiatan	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



## 2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN

Dalam bagian ini menyajikan analisa capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sasaran/target Renstra, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta dikaitkan juga dengan peraturan perundang-undangan tentang kinerja pelayanan. Bakesbangpol telah menyusun indikator kinerja pelayanan sesuai tupoksinya yang dituangkan pada Perubahan Renstra Bakesbangpol Tahun 2018-2023 adalah :

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat			83,00	83,25	83,50	87,00	87,25	84,5	87,47	87,89	88,00	89,00	

Untuk indikator *Tujuan* Terjaganya Kondusifitas Kota Bandung pada *Sasaran* Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya diukur dengan Persentase Potensi Konflik tidak Menjadi Konflik, yang dihitung berdasarkan jumlah kejadian yang ditangani berbanding dengan jumlah kejadian berpotensi konflik kali 100%. Target harus 100% menunjukkan tidak boleh ada satupun konflik di Kota Bandung, dan syukurlah sampai dengan tahun 2021 target 100% bisa dicapai.

Selain indikator diatas Kesbangpol memiliki *Tujuan* Meningkatkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa & Politik dengan *Sasaran* Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat. Untuk mengukurnya memakai cara kuisisioner kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan berupa surat ijin penelitian/kerja praktek/survey. Untuk tahun 2021 target 83,50 bisa dicapai di 87,89 dan untuk tahun 2022 dari target 87,00 sampai dengan realisasi masih dalam proses perhitungan.

Untuk pencapaian indikator “persentase konflik tidak menjadi konfli” faktor pendukungnya adalah koordinasi yang baik dengan jajaran samping/instansi vertical; mengoptimalkan koordinasi dengan forum-forum mitra strategis Bakesbangpol (Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat); dan memfasilitasi permintaan ijin menyampaikan pendapat di muka diarahkan untuk audiensi perwakilan dengan instansi terkait & instansi vertikal. Adapun faktor penghambatnya adalah kewenangan atas urusan pemerintahan umum di daerah belum optimal.

Sedangkan untuk pencapaian indikator “indeks kepuasan masyarakat” faktor pendukungnya adalah transparansi aturan dan biaya yang nol rupiah, proses lebih cepat melalui media *on line* maupun datang langsung. Adapun faktor penghambatnya adalah kapasitas ruang tunggu kurang memadai dan otorisasi surat rekomendasi masih bersifat manual belum elektronik.

### **2.3 SU-ISU PENTING, PENTING PENYELENGGARAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bakesbangpol Kota Bandung berkaitan dengan kondisi sosial politik, budaya, ekonomi, agama, dan juga situasi keamanan yang terus mengalami dinamika. memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di Kota Bandung dapat dikemukakan beberapa masalah yang terkait dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung sebagai berikut :

1. Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang mengalami tekanan pasca pandemi berimbas pada rendahnya respon masyarakat dalam menangkul berbagai friksi sosial yang bernuasa kepentingan kelompok atau golongan, penegakan hukum belum optimal dan terjadinya demonstrasi yang memprotes pemerintah.
2. Penanganan Potensi Konflik akan meningkat karena potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagai dampak heterogenitas/dinamika kehidupan sosial & politik masyarakat serta meningkatnya arus globalisasi.
3. Mengoptimalkan koordinasi upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) karena meningkatnya Pengguna Narkoba seiring dengan perkembangan wilayah perkotaan;
4. Mengoptimalkan pemantauan orang asing tenaga kerja asing dan lembaga asing antar Instansi Pemerintah karena pendataan orang asing secara mandiri belum bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai anggota Tim PORA.

### **2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rancangan awal RKPD Kota Bandung tahun 2023 merupakan langkah awal bagi SKPD dalam penyusunan rancangan awal Renja tahun 2023 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahun 2023. Program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD sehingga menghasilkan program prioritas pembangunan.

Pada tahun 2023 program/kegiatan/sub kegiatan Bakesbangpol mengikuti nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 c.q. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021. Rancangan awal Renja tahun 2023 akan di sinkronisasi dengan rancangan awal RKPD sehingga menjadi rumusan program/kegiatan/sub kegiatan yang definitif untuk dijadikan rencana kerja tahun 2023. Berikut ini adalah tabel review terhadap rancangan awal RKPD Kota Bandung Tahun 2023.

# COPY OF ORIGINAL DOCUMENT



Issued by

**Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik**

COPY OF ORIGINAL

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kota Bandung

N o	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan penunjang urusan pemerintahan	100 %	9.992.176.720	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	9.604.602.074	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi keuangan	100 %	9.883.576.720	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi keuangan	100 %	9.559.102.074	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	9.883.576.720	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	9.559.102.074	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				108.600.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan administrasi keuangan	100 %	45.500.000	
02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	108.600.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	45.500.000	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan penunjang urusan pemerintaha	100 %	3.987.419.600	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	3.527.530.123	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan perencanaan, penganggaran & evaluasi	100 %	100.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Cakupan perencanaan, penganggaran & evaluasi	100 %	87.000.000	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik





COPY OF ORIGINAL

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	100.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	87.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				876.514.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan administrasi umum	100 %	567.071.622	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	42.989.922	
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	51.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	43.053.900	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	234.494.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	165.292.800	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	42.100.000	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokume	402.300.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	13.260.000	Kode belanja sosialisasi/iklan harus dialihkan dari sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan ke sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Issued by

Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik



COPY OF ORIGINAL

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100.720.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	260.375.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan barang milik daerah	100 %	402.750.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan Pengadaan barang milik daerah	100 %	343.462.800	
05	Pengadaan Mebel	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	50.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	46.252.800	
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	352.750.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	297.210.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.244.130.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.202.464.401	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	682.570.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	659.102.001	
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	54.500.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	39.336.000	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	507.060.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	504.026.400	

Bahasa dan Politik



COPY OF ORIGINAL

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	1.364.024.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	1.327.531.300	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	41 Unit	1.086.024.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	41 Unit	1.016.010.300	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	80.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	62.860.000	
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	198.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	248.661.000	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3.242.000.000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				766.861.300	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup ideologi	100 %	3.242.000.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup ideologi	100 %	766.861.300	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan	8 Kegiatan	3.242.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan	8 Kegiatan	766.861.300	

Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik



COPY OF ORIGINAL

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	2.982.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	634.685.200	
04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	60.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	13.475.000	

Issued by  
Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik





COPY OF ORIGINAL

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 Keluar	200.000.000	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 Keluarga	118.701.100	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					2.932.199.300	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			1.838.853.100	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup politik	100 %	2.932.199.300	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup politik	100 %	1.838.853.100	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah pembinaan politik	13 Kegiatan	2.932.199.300	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah pembinaan politik	13 Kegiatan	1.838.853.100	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

COPY OF ORIGINAL

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1000 Orang	2.930.999.300	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1000 Orang	1.425.812.600	

Issued by

Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik



COPY OF ORIGINAL

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang	1.200.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang	413.040.500	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					2.067.000.000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1.889.896.400	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup kewaspadaan nasional	100 %	2.067.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup kewaspadaan nasional	100 %	1.889.896.400	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah kerjasama intelijen dan koordinasi kewaspadaan nasional	8 Kegiatan	2.067.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah kerjasama intelijen dan koordinasi kewaspadaan nasional	8 Kegiatan	1.889.896.400	

Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik



COPY OF ORIGINAL

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	250 Orang	603.376.800	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	250 Orang	463.400.000	

Issued by

Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik





COPY OF ORIGINAL

N o	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	1.271.623.200	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	1.297.496.400	
06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokume	192.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	129.000.000	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					1.981.000.000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					871.673.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup sosial kemasyarakatan	100 %	751.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup sosial kemasyarakatan	100 %	391.290.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan		Jumlah pembinaan ormas	25 Kegiata	751.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan		Jumlah pembinaan ormas	25 Kegiatan	391.290.000	

Bangsa dan Politik



COPY OF ORIGINAL

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					
03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 Orang	751.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 Orang	391.290.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase konflik tidak menjadi konflik lingkup ekonomi, sosial dan budaya	100 %	1.230.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase konflik tidak menjadi konflik lingkup ekonomi, sosial dan budaya	100 %	480.383.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah koordinasi dan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	6 Kegiatan	1.230.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah koordinasi dan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	6 Kegiatan	480.383.000	

Issued by

Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik



COPY OF ORIGINAL

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Capaian Target	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500 Orang	1.230.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500 Orang	480.383.000	
					24.201.795.620					18.499.415.997	

Issued by

Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik



## TUJUAN DAN SASARAN BAKESBANGPOL

### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Penetapan kebijakan penyelenggaraan program/kegiatan/sub kegiatan Bakesbangpol Kota Bandung juga merujuk pada Kebijakan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai Isu Utama yaitu:

- a. Peningkatan Kapasitas SDM dan Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), melalui fasilitasi kebijakan, pembinaan dan pengawasan aktivitas, penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan, serta pendidikan politik bagi pengurus dan anggota Ormas;
- b. Peningkatan Kualitas Demokrasi serta Kapasitas SDM dan Kelembagaan Partai Politik, melalui penguatan regulasi bidang politik dalam negeri, peningkatan partisipasi politik masyarakat, penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan melalui pendidikan politik bagi anggota partai politik, peningkatan bantuan keuangan parpol serta peningkatan kualitas SDM anggota parpol;
- c. Memperkuat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam rangka Pengentasan Kemiskinan, Penciptaan Lapangan Pekerjaan dan Menurunkan Kesenjangan Sosial, melalui pendayagunaan mitra strategis pemerintah seperti FKUB, Timdu P4GN, FKDM, dan Ormas;
- d. Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Penyelenggaraan Kewaspadaan Nasional, melalui peningkatan kewaspadaan dini daerah, penanganan konflik sosial, kerjasama intelkam dan upaya penggalangan preventif bagi daerah rawan konflik;
- e. Peningkatan Implementasi Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, pada seluruh aparatur pemerintahan daerah, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi sebagai agen pembumih nilai-nilai Pancasila.

Adapun Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Tahun 2020-2024 mempunyai Tujuan Strategis yaitu Terpeliharanya Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa dengan tiga Sasaran Strategis yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia; Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu; dan Indeks Kinerja Ormas.
2. Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dengan indikator Indeks Kewaspadaan Nasional.



- Meningkatkan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Daerah dengan indikator Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi; Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM); Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi; Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.

### 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi; kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan jangka menengah Bakesbangpol Kota Bandung secara teknokratik ditempuh dengan menelaah RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 c.q. Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Visi Bakesbangpol Kota Bandung mengikuti visi Kota Bandung yaitu “Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”. Untuk misi Bakesbangpol Kota Bandung terkait dengan Misi 1 yaitu “Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing”. Sedangkan pelayanannya mengikuti Misi 2 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih”.

Berdasarkan Perubahan Renstra Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2018-2023 maka Tujuan dan Sasaran Bakesbangpol Kota Bandung adalah sbb:

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol Kota Bandung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA 2023
Misi 1. Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas & Berdaya Saing			
Terjaganya Kondusifitas Kota Bandung	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik	100%
Misi II: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih			
Meningkatkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa & Politik	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,25%

Tujuan pertama Bakesbangpol Kota Bandung adalah “Terjaganya Kondusifitas Kota Bandung” dengan Sasaran “Meningkatnya Pembinaan Kerukunan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya” dengan Indikator “Persentase Potensi Konflik Tidak Menjadi Konflik”. Tujuan keduanya untuk mengukur pelayanan kepada masyarakat adalah “Meningkatkan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa & Politik” dengan

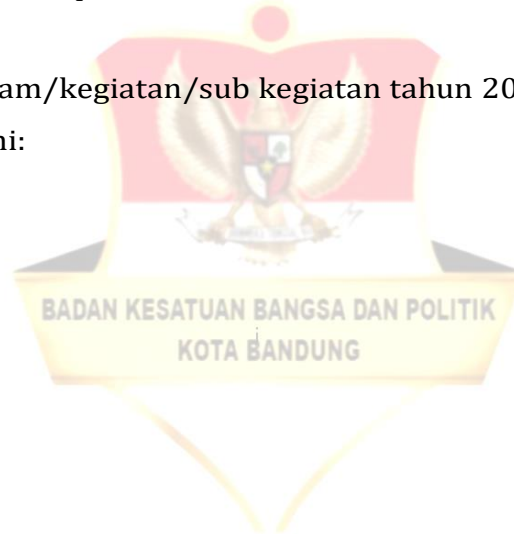
Sasaran “Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pelayanan Kepada Masyarakat” dengan Indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”.

### 3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan keselarasan perencanaan pembangunan di Ditjen Polpum Kemendagri dan perencanaan di daerah baik RPJMD maupun Renstra serta peraturan terkini diantaranya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 c.q. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 maka Bakesbangpol Kota Bandung merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan untuk tahun 2023 dengan rekapitulasi yaitu:

Jumlah Program : 6 (enam) buah  
Jumlah Kegiatan : 12 (dua belas) buah  
Jumlah Sub Kegiatan : 27 (dua puluh tujuh) buah  
Pagu Indikatif APBD : Rp 18.499.415.997 (delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)

Tabel rencana program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2023 dan perkiraan tahun 2024 dalam tabel berikut ini:



Issued by

**Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik**

COPY OF ORIGINAL

Tabel 3. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kota Bandung

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				18.499.415.997	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		20.349.357.597	
					9.604.602.074				10.565.062.281
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	9.604.602.074			100 %	10.565.062.281
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan		100 %	9.559.102.074			100 %	10.515.012.281
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 Orang/bulan	9.559.102.074			47 Orang/bulan	10.515.012.281
II	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan		100 %	45.500.000			100 %	50.050.000
02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Paket	45.500.000			50 Paket	50.050.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	3.527.530.123			100 %	3.880.283.135
III	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran & evaluasi		100 %	87.000.000			100 %	95.700.000
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	87.000.000			1 Laporan	95.700.000
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum		100 %	567.071.622			100 %	623.778.784

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

COPY OF ORIGINAL

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Paket	42.989.922			1 Paket	47.288.914
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	43.053.900			1 Paket	47.359.290
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	165.292.800			1 Paket	181.822.080
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	42.100.000			1 Paket	46.310.000
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen	13.260.000			10 Dokumen	14.586.000
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	260.375.000			1 Laporan	286.412.500
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan barang milik daerah		100 %	343.462.800			100 %	377.809.080
05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	46.252.800			10 Unit	50.878.080

Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik





COPY OF ORIGINAL

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	297.210.000			12 Unit	326.931.000
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang		100 %	1.202.464.401			100 %	1.322.710.841
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	659.102.001			12 Laporan	725.012.201
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	39.336.000			1 Laporan	43.269.600
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	504.026.400			12 Laporan	554.429.040
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah		100 %	1.327.531.300			100 %	1.460.284.430
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	41 Unit	1.016.010.300			41 Unit	1.117.611.330
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Unit	62.860.000			100 Unit	69.146.000

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



COPY OF ORIGINAL

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	248.661.000			1 Unit	273.527.100
B	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup ideologi</b>		<b>100 %</b>	<b>766.861.300</b>			<b>100 %</b>	<b>843.547.430</b>
VIII	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Jumlah pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan</i>		<i>8 Kegiatan</i>	<i>766.861.300</i>			<i>8 Kegiatan</i>	<i>843.547.430</i>
03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	634.685.200			100 Orang	698.153.720
04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	13.475.000			50 Orang	14.822.500

Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik

COPY OF ORIGINAL

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kota Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Keluarga	118.701.100			100 Keluarga	130.571.210
C	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup politik		100 %	1.838.853.100			100 %	2.022.738.410
IX	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah pembinaan politik		13 Kegiatan	1.838.853.100			13 Kegiatan	2.022.738.410

Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik



COPY OF ORIGINAL

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 Orang	1.425.812.600			1000 Orang	1.568.393.860
04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Orang	413.040.500			200 Orang	454.344.550
D	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup kewaspadaan nasional		100 %	1.889.896.400			100 %	2.078.886.040

Issued by  
Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik





COPY OF ORIGINAL

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kerjasama intelijen dan koordinasi kewaspadaan nasional		8 Kegiatan	1.889.896.400			8 Kegiatan	2.078.886.040
03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 Orang	463.400.000			250 Orang	509.740.000
04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	1.297.496.400			50 Orang	1.427.246.040

Issued by

Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik

COPY OF ORIGINAL

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	129.000.000			1 Dokumen	141.900.000
E	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup sosial kemasyarakatan</b>		100 %	391.290.000			100 %	430.419.000
XI	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Jumlah pembinaan ormas</i>		25 Kegiatan	391.290.000			25 Kegiatan	430.419.000
03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Orang	391.290.000			500 Orang	430.419.000
F	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase konflik tidak menjadi konflik lingkup ekonomi, sosial dan budaya</b>		100 %	480.383.000			100 %	528.421.300
XII	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	<i>Jumlah koordinasi dan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya</i>		6 Kegiatan	480.383.000			6 Kegiatan	528.421.300

Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik

COPY OF ORIGINAL

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500 Orang	480.383.000			500 Orang	528.421.300
	<b>J U M L A H</b>				18.499.415.997				20.349.357.597

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDUNG

Issued by

Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rencana kerja adalah suatu proses yang tidak pernah berakhir, apabila rencana telah ditetapkan, maka dokumen mengenai perencanaan yang terkait harus diimplementasikan. Karena perencanaan atau rencana kerja adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa (Husein Umar, 2009).

Rencana Kerja digunakan dalam manajemen sebagai pedoman pengarahan program/kegiatan/sub kegiatan dan juga sebagai titik tolak proses pengendalian dan evaluasi yang disusun pada setiap periode. Pada bab ini memuat rencana kerja dan pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung sebagaimana dalam tabel berikut ini:


Tabel 4. 1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023 Kota Bandung

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			18.499.415.997
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	13.132.132.197
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	100 %	9.559.102.074
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	9.559.102.074
II	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan	100 %	45.500.000
02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	45.500.000
III	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran & evaluasi	100 %	87.000.000
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	87.000.000
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum	100 %	567.071.622
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	42.989.922
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	43.053.900
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	165.292.800
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	42.100.000





No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	13.260.000
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	260.375.000
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan barang milik daerah	100 %	343.462.800
05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	46.252.800
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	297.210.000
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.202.464.401
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	659.102.001
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	39.336.000
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	504.026.400
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	100 %	1.327.531.300
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	41 Unit	1.016.010.300
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	62.860.000
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	248.661.000
B	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup ideologi	100 %	766.861.300
VIII	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan	8 Kegiatan	766.861.300
03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	634.685.200

<div><div><div>Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Tahun 2022</div></div><div></div></div>				
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50 Orang	13.475.000
06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	100 Keluarga	118.701.100
C	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup politik	100 %	1.838.853.100
IX	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah pembinaan politik	13 Kegiatan	1.838.853.100
03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1000 Orang	1.425.812.600
04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang	413.040.500
D	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup kewaspadaan nasional	100 %	1.889.896.400



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
X	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kerjasama intelijen dan koordinasi kewaspadaan nasional	8 Kegiatan	1.889.896.400
03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	250 Orang	463.400.000
04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	1.297.496.400
06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	129.000.000
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase potensi konflik tidak menjadi konflik lingkup sosial kemasyarakatan	100 %	391.290.000
XI	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan ormas	25 Kegiatan	391.290.000
03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 Orang	391.290.000
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase konflik tidak menjadi konflik lingkup ekonomi, sosial dan budaya	100 %	480.383.000
XII	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah koordinasi dan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	6 Kegiatan	480.383.000



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5
03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	500 Orang	480.383.000
				18.499.415.997

COPY OF ORIGINAL

DOCUMENT



Issued by

Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik





## 5.1 CATATAN PENTING

Program/kegiatan/sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik seluruhnya bersifat non fisik; lebih kearah fasilitasi dan pembinaan, sehingga tidak terasa langsung di masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung memiliki 6 (enam) Program, 12 (dua belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan Pagu Indikatif APBD sebesar Rp 18.499.415.997 (delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah)

## 5.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Renja Bakesbangpol) Kota Bandung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Renja Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2023 berpedoman kepada Rencana Strategis/Renstra Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2018-2023 c.q. Perubahan Renstra Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2018-2023.
2. Renja Bakesbangpol Tahun 2023 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2023.
3. Nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renja Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2023 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah c.q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Selanjutnya Renja Bakesbangpol Kota Bandung Tahun 2023 akan diinput dalam SIPD sesuai Permendagri 70 Tahun 2019 ttg Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan besaran anggaran sesuai Surat Edaran Walikota atau Sekretaris Daerah Kota Bandung yang mencantumkan pagu anggaran.
5. Menyikapi Perubahan RKPD Kota Bandung Tahun 2023 maka akan dilakukan Perubahan Renja Bakesbangpol Kota Bandung tahun 2023 seperlunya.

### 5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mengoptimalkan seluruh Anggaran dan mencapai hasil (*outcome*) program maupun keluaran (*output*) kegiatan maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung akan lebih meningkatkan koordinasi dengan seluruh stakeholder urusan kesatuan bangsa dan politik untuk menjaga kondusifitas negara khususnya di Kota Bandung.

Tema seluruh sub kegiatan akan disesuaikan dengan isu yang hangat baik isu lokal maupun nasional, karena isu mengenai kesatuan bangsa dan politik sangat dinamis.

Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung ini disusun, semoga dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi kita semua.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDUNG,

**Drs. H. BAMBANG SUKARDI, M. Si.**

Pembina Utama Muda/ IV c

NIP. 19671005 198903 1 008

Issued by

**Badan Kesatuan  
Bangsa dan Politik**